

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

LAPORAN TPID TRIWULAN III 2024

LATAR BELAKANG

Inflasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, juga terkait erat dengan produktivitas ekonomi, serta parameter ekonomi lainnya. Inflasi berarti meningkatnya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dari waktu ke waktu (bulan ke bulan atau tahun ke tahun). Informasi mengenai besaran inflasi diperlukan untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan suatu daerah dan membuat masyarakat bergairah untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi. Akan tetapi, tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi mengakibatkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi, dan arah perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi yang keliru yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan program Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, dimana kinerja TPID diukur dan dinilai melalui Evaluasi Kinerja TPID.

II. GAMBARAN UMUM INFLASI DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari 17 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 117 Desa, 14 Desa Persiapan dan 31 Dusun yang tersebar di 17 Pulau dengan luas wilayah 72.427,2 km² dengan luas wilayah daratan sebesar 8.648 Km² (11.9% dari total luas wilayah) dan luas wilayah perairan sebesar 63.779,2 Km² (88.1% dari total luas wilayah). Secara geografis, Kabupaten Maluku Barat Daya terletak antara 6° 18' Lintang Selatan sampai dengan 8° 37' Lintang Selatan dan 122° 44' Bujur Timur sampai dengan 130° 05' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya berada pada Selatan laut Banda dan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.

Menjaga kestabilan harga merupakan salah satu masalah utama makro ekonomi, disamping beberapa masalah makro ekonomi penting lainnya seperti mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pendistribusian pendapatan yang adil dan merata. Stabilitas ekonomi suatu negara di antaranya tercermin dari adanya stabilitas harga, dalam arti tidak terdapat gejolak harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen yang akan merusak sendi-sendi perekonomian.

Pengendalian inflasi sangat penting menjadi salah satu perhatian pemerintah karena beberapa alasan Pertama, inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat barang jasa yang riil terhadap asset finansial domestik semakin rendah (bahkan seringkali negatif), sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi. Kedua, dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defesit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan hutang luar negeri. Ketiga, inflasi dapat memperburuk

distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumberdaya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen. Keempat, inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal keluar negeri. Kelima, inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Inflasi juga merupakan masalah yang dihadapi setiap perekonomian Tingkat inflasi yaitu presentasi kenaikan harga – harga untuk menunjukkan sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi Pada permasalahan tersebut diatas, maka sangat wajar jika perkembangan inflasi dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok sewaktu-waktu dapat mengalami kenaikan.

No	Komoditi	Juli I	Juli II	Juli III	Juli IV
1	Beras	17,000	17,000	17,000	17,000
2	Jagung	17,000	17,000	17,000	17,000
3	Bawang Merah	50,000	35,000	35,000	35,000
4	Bawang Putih	50,000	50,000	50,000	50,000
5	Cabai Besar	70,000	70,000	70,000	70,000
6	Cabai Rawit	25,000	25,000	25,000	25,000
7	Daging Sapi	100,000	100,000	100,000	100,000
8	Daging Ayam	65,000	65,000	65,000	65,000
9	Telur Ayam	70,000	70,000	70,000	70,000
10	Gula Pasir	20,000	20,000	20,000	20,000
11	Minyak Goreng	18,000	20,000	20,000	20,000

Namun berdasarkan data pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, IPH komoditi Pangan yang tercatat di tingkat pengecer di bulan Juli adalah sbb: Harga Pangan Data Harga Pangan

Bulan Juli 2024

Sumber data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada Bulan Juli minggu I s/d Juli minggu IV tidak terjadi perubahan harga.

Data Harga Pangan Bulan Agustus 2024

No	Komoditi	Agst I	Agst II	Agst III	Agst IV
1	Beras	17,000	17,000	17,000	17,000
2	Jagung	15,000	15,000	15,000	15,000
3	Bawang Merah	30,000	30,000	30,000	25,000
4	Bawang Putih	50,000	50,000	50,000	50,000
5	Cabai Besar	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Cabai Rawit	30,000	30,000	30,000	40,000
7	Daging Sapi	100,000	100,000	100,000	100,000
8	Daging Ayam	70,000	70,000	70,000	70,000
9	Telur Ayam	70,000	70,000	70,000	65,000
10	Gula Pasir	20,000	20,000	20,000	20,000
11	Minyak Goreng	20,000	20,000	20,000	20,000

Sumber data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada Bulan Agustus Minggu I s/d Agustus Minggu IV tidak mengalami perubahan harga komoditi di bulan agustus .

Data Harga Pangan Bulan September 2024

No	Komoditi	Sept I	Sept II	Sept III	Sept IV
1	Beras	18,000	18,000	18,000	18,000
2	Jagung	15,000	15,000	15,000	15,000
3	Bawang Merah	25,000	25,000	30,000	30,000
4	Bawang Putih	50,000	50,000	50,000	50,000
5	Cabai Besar	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Cabai Rawit	60,000	60,000	60,000	60,000
7	Daging Sapi	100,000	100,000	100,000	100,000
8	Daging Ayam	70,000	70,000	70,000	70,000
9	Telur Ayam	65,000	65,000	65,000	65,000
10	Gula Pasir	20,000	20,000	20,000	20,000
11	Minyak Goreng	20,000	20,000	20,000	20,000

Sumber data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada Bulan September Minnngu I s/d September Minggu IV tidak terjadi perubahan harga. Rata-rata pada 11 komoditi, harga tetap/stabil.

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. Memperkuat sinergi antara TPID Kabupaten Maluku Barat Daya dengan TPID Provinsi

Maluku.

2. Mengoptimalkan pelaksanaan Program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif).
3. Pelaksanaan rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan High level Meeting TPID bersama para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah konkrit Pengendalian Inflasi di daerah.

A. MEMPERKUAT SINERGI TPID KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok dengan memperkuat sinergi dan kerja sama antar Pemerintah Daerah bersama Forkopimda dan Stakeholder lainnya yang berperan penting dalam pengendalian Inflasi Daerah. Disisi lain

Pemerintah daerah juga melakukan Koordinasi antar stakeholder terkait, untuk mengantisipasi penyelesaian masalah-masalah yang akan terjadi. Hal ini dilakukan agar inflasi tetap terjaga. Karena salah satu syarat dari pertumbuhan ekonomi yang baik adalah kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Oleh Karen itu diperlukan sinergi yang baik dari berbagai pihak guna pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

A. MENGOPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM 4K

Guna mengoptimalkan pelaksanaan Program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif), maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Triwulan I (satu) melakukan beberapa upaya dalam pengendalian inflasi di daerah antara lain:

**DINAS PERTANIAN MELAKSANAKAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 19 JULI
2024**

DINAS PERTANIAN MELAKSANAKAN PENGIRIMAN BIBIT PALA

DINAS PERTANIAN MELAKSANAKAN GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)

**DALAM
RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 22
AGUSTUS 2024**

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Melihat kondisi geografis Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan daerah Kepulauan, maka masalah transportasi dan Masalah cuaca masih menjadi kendala yang menyebabkan tingginya inflasi. Ketersediaan angkutan Laut (Kapal/Feri) yang terbatas, harga tiket pesawat yang tinggi, dan tingginya jasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang menyebabkan harga barang cukup tinggi serta kelancaran distribusi terhambat. Di sisi lain, belum ada kerja sama antar daerah (KAD) yang merupakan daerah distribusi, menyebabkan banyak hasil panen tidak terdistribusi dengan baik sehingga masyarakat mengalami kerugian. Selain itu system kerja BUMD yang belum optimal menjadi salah satu kendala terjadinya inflasi.

Meskipun dengan kondisi demikian, Pemerintah Daerah tetap berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi inflasi. Salah satu yang menjadi program rutin Pemerintah Daerah setiap tahunnya adalah melakukan kegiatan Sidak Pasar serta Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan tersebut dilakukan untuk menekan laju inflasi serta dapat membantu masyarakat ekonomi lemah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

D. PENYUSUNAN KEBIJAKAN

- 1 Penyusunan SK Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Barat Daya.
- 2 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 500.10-317 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Barat Daya.
- 3 Penyusunan Self Assessment Penilaian Kinerja TPID Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024.
- 4 Penyusunan OPS Kinerja TPID Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

E. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk meningkatkan efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Maluku Barat Daya, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat di terapkan :

- 1 Penguatan Sistem Logistik dan Distribusi antara lain Optimalisasi program tol laut untuk menekan biaya distribusi bahan pokok dan barang kebutuhan lainnya, Pembangunan Gudang penyimpanan dan pasar induk guna mengurangi fluktuasi harga akibat keterbatasan stok, dan meningkatkann kerjasama dengan daerah lain untuk skema pedagagan antar wilayah.
2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan lokal yakni mendorong pengembangan pertanian berbasis lahan lokal dengan memberikan subsidi benih, pupuk, dan alat pertanian modern, diversifikasi komoditas pangan dengan memperkuat sektor perikanan dan peternakan lokal.
3. Penambahan armada Kapal Laut untuk mempermudah akses distribusi barang dari daerah penghasil ke Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga keterjangkauan harga barang dapat diatasi.

Demikian laporan perkembangan inflasi dan pelaksanaan pengendalian inflasi di Kab Kabupaten Maluku Barat Daya Triwulan III Tahun 2024.